



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Telepon/Faksimile (0536) 3222359
Laman <https://inspektorat.kalteng.go.id>, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

LAPORAN HASIL REVIU

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH (RKAP-PD)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR 700.1.2.2/275/LHR/2024/INSP

TANGGAL 10 OKTOBER 2024

A. RINGKASAN EKSEKUTIF

Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD, berdasarkan pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah. Kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Kepala Daerah dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya Kepala Daerah berdasarkan Nota Kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan RKA-PD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-PD. Kepala Perangkat Daerah menyusun RKA-SKPD, dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran.

Sesuai Surat Tugas dari Gubernur Kalimantan Tengah 700/31/SPT/IRBAN-II/INSP tanggal 26 Agustus 2024 Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024. Adapun reviu dilaksanakan setelah penyusunan RKAP-PD oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dengan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan, telah sesuai.

2. Pencantuman pagu indikatif rencana program, dan kegiatan antara RKAP-SKPD, PPAS Perubahan dan Renja Perubahan, telah sesuai.
3. Satuan Harga dalam Dokumen RKAP-SKPD sudah sesuai Standar Harga, akan tetapi masih terdapat rencana belanja dengan koefisien tidak rasional.
4. Rumusan kegiatan sudah mendefinisikan tolok ukur dan target kinerja pada indikator capaian program dan hasil/*outcome*, akan tetapi masih terdapat Sub Kegiatan yang memiliki Keluaran (*Output*) berbeda antara dokumen RKAP, KUPA-PPAS Perubahan dan Renja Perubahan.
5. Terdapat 9 (sembilan) Sub Kegiatan yang belum didukung dengan dokumen perencanaan yang cukup berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference*.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
3. Surat Tugas dari Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 700/31/SPT/IRBAN-II/INSP tanggal 26 Agustus 2024.

C. TUJUAN REVIU

Tujuan dari dilaksanakannya reviu RKAP-PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi RKAP-PD sesuai dengan KUPA/PPAS Perubahan serta kesesuaian dengan standar biaya, kaidah-kaidah penganggaran dan dilengkapi dokumen pendukung RKAP-SKPD.

D. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu adalah pengujian atas penyusunan dokumen RKAP-PD, serta mencakup pengujian terbatas atas dokumen sumber, namun tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

E. METODOLOGI REVIU

1. Reviu RKAP-PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah.

2. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait proses penyusunan RKAP-PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

3. Susunan tim sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab : H. SARING, S.H., M.H., CGCAE
NIP. 19650510 198703 1 003
- b. Pembantu Penanggungjawab : DIANA, S.H., CGCAE
NIP. 19820629 200604 2 006
- c. Pengendali Teknis : HENDRA, S.STP., M.AP
NIP. 19780412 199612 1 002
- d. Ketua Tim : BETSIANY, S.Hut
NIP. 19810512 201001 2 003
- d. Anggota Tim : 1) HERYANTO S.H. SIREGAR, S.E.
NIP. 19830925 201001 1 022
2) HARRY SETIAWAN, S.H., CFA
NIP. 19850402 201503 1 001

Reviu RKAP-PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari, yang terhitung mulai tanggal 2 September s.d. 11 September 2024.

F. URAIAN HASIL REVIU

Sesuai Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:900/028.2/TAPD/2024, dan Nomor 180/104/DPRD/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024, bahwa pagu indikatif pada Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-P SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah Rp18.155.368.248,00 dengan jumlah program/kegiatan/sub kegiatan :

- 10 (sepuluh) program
- 24 (dua puluh lima) kegiatan
- 51 (enam puluh tiga) sub kegiatan

dengan rincian sebagai berikut:

Kode					Uraian	Anggaran (Rp)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18.155.368.248,00

Kode					Uraian	Anggaran (Rp)
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.307.303.639,00
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.711.529.709,00
2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	412.738.912,00
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.573.877,00
2	08	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	31.046.968,00
2	08	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.516.476,00
2	08	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	317.601.591,00
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.291.134.135,00
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.216.976.833,00
2	08	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00
2	08	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	64.157.302,00
2	08	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.231.906,00
2	08	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36.231.906,00
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161.171.746,00
2	08	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	161.171.746,00
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.531.464.410,00
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.937.132,00
2	08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	925.854.257,00
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.008.485,00
2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.600.000,00
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.133.129,00
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.271.797.307,00
2	08	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	160.134.100,00
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	284.182.506,00
2	08	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	54.855.456,00
2	08	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	229.327.050,00
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.503.640.830,00

Kode					Uraian	Anggaran (Rp)
2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.703.452,00
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	304.577.648,00
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.185.359.730,00
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490.965.264,00
2	08	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.004.900,00
2	08	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.645.953,00
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	285.314.411,00
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	989.855.574,00
2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	199.043.476,00
2	08	02	1.01	05	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	74.278.437,00
2	08	02	1.01	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	71.986.600,00
2	08	02	1.01	07	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	52.778.439,00
2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	753.786.298,00
2	08	02	1.02	03	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	546.071.310,00
2	08	02	1.02	04	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	207.714.988,00
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	37.025.800,00
2	08	02	1.03	05	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	37.025.800,00
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	526.052.238,00
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	172.690.311,00
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	50.362.102,00

Kode					Uraian	Anggaran (Rp)
2	08	03	1.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	122.328.209,00
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	230.059.781,00
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	137.098.679,00
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	92.961.102,00
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	123.302.146,00
2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	102.317.146,00
2	08	03	1.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	20.985.000,00
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	249.544.817,00
2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	73.796.000,00
2	08	04	1.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	73.796.000,00
2	08	04	1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	175.748.817,00
2	08	04	1.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	175.748.817,00
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	205.030.460,00
2	08	05	1.01		Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	205.030.460,00
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	54.173.010,00

Kode					Uraian	Anggaran (Rp)
2	08	05	1.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	150.857.450,00
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	637.058.913,00
2	08	06	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	282.855.606,00
2	08	06	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	24.409.706,00
2	08	06	1.01	03	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	258.445.900,00
2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	354.203.307,00
2	08	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	104.203.307,00
2	08	06	1.02	05	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	988.231.328,00
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	494.735.634,00
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	96.126.741,00
2	08	07	1.01	04	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupate layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA kewenangan Provinsi	398.608.893,00
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	493.495.694,00
2	08	07	1.02	05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindugnan khusus kewenangan Provinsi	121.578.742,00
2	08	07	1.02	06	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	371.916.952,00
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	848.065.209,00
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	151.984.773,00
2	14	02	01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	151.984.773,00

Kode					Uraian	Anggaran (Rp)
2	14	02	01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	151.984.773,00
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	36.339.945,00
2	14	03	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	36.339.945,00
2	14	03	1.02	04	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga kencana	36.339.945,00
2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-
2	14	03	1.01	13	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	659.740.491,00
2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	659.740.491,00
2	14	04	1.01	17	Pelaksanaan Fasilitasi. Pembimbingan. Pengembangan. dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	659.740.491,00
JUMLAH						18.155.368.248,00

Berdasarkan hasil revidi, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Kesesuaian Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P), Rencana Kerja (RENJA) Perubahan dan KUPA-PPAS Perubahan

Berdasarkan hasil revidi, diketahui bahwa kesesuaian rumusan rencana program dan kegiatan dalam RENJA Perubahan dan KUPA-PPAS Perubahan pada dasarnya sudah terakomodir dalam RKAP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan 10 (sepuluh) Program, 24 (dua puluh empat) Kegiatan, dan 51 (lima puluh tiga) Sub Kegiatan.

2. Kesesuaian pencantuman pagu indikatif rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Anggaran (RKAP-SKPD), Rencana Kerja dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P).

Nilai PPAS-P Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:900/028.2/TAPD/2024, dan Nomor 180/104/DPRD/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Prioritas dan Planfon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.155.368.248,00, sesuai dengan pagu anggaran menurut RKAP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

3. Kesesuaian Penerapan Standar Satuan Harga dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP-PD).

Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan anggaran belanja kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang terintegrasi dengan Standar Satuan Harga dan Biaya Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan yang berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024. Secara keseluruhan satuan harga dan biaya kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah sesuai ketentuan. Akan tetapi masih terdapat rencana belanja dengan koefisien tidak rasional, yaitu:

KODE					URAIAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
2	8	01	1.01		PERENCANAAN. PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				
2	8	01	1.01	07	EVALUASI KIBERJA PERANGKAT DAERAH				
5.1.02.01.01.0026					BELANJA BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK				
					BAHAN CETAK SPESIFIKASI : FOTOVOPY HVS	70.637,478038	LEMBAR	325	22.957.180,36
2	8	01	1.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH				
2	8	01	1.03	02	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD				
5.1.02.01.01.0026					BELANJA BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK				

					BAHAN CETAK SPESIFIKASI : FOTOVOPY HVS	36.718,246138	LEMBAR	325	11.933.429,99
2	8	01	1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				
2	8	01	1.05	09	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS FUGSI				
5.1.02.02.12.0003					BELANJA BIMBINGAN TEKNIS				
					BEBAN BIMBINGAN TEKNIS	4 ORANG/KALI X 0,846156	ORANG/KALI	6.500.000,00	22.000.056,00
					SPEDIFIKASI: DANA KONTRIBUSI DIKLAT/BIMTEK 4-6 HARI				
2	8	01	1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
2	8	01	1.06	08	FASILITAS KUNJUNGAN TAMU				
5.1.02.01.01.0053					BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU				
					BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU	750,3144654 KOTAK	ORANG/KALI	15.900,00	11.930.000,00
					SPEDIFIKASI: SATUAN BIAYA KONSUMSI				

4. Kepatuhan terhadap Kaidah-Kaidah Penganggaran.

Penyusunan penganggaran pada masing-masing sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sudah mendefinisikan tolok ukur dan target kinerja pada indikator capaian program dan hasil/*outcome*.

Kegiatan dalam RKAP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 telah cukup memenuhi kaidah-kaidah dalam penganggaran.

Namun masih terdapat Sub Kegiatan yang memiliki Keluaran (*Output*) berbeda antara dokumen RKAP, KUPA-PPAS P dan Renja Perubahan yaitu pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi dan sub kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 97 Ayat (1), Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2) huruf c berpedoman pada :

- Indikator Kinerja;**
- Tolok Ukur dan Sasaran Kinerja** sesuai analisis standar belanja;
- Standar harga satuan;
- Rencana kebutuhan BMD; dan
- Standar Pelayanan Minimal.

5. Kelengkapan Dokumen Pendukung.

Penyusunan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKAP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah masih terdapat 9 Sub Kegiatan yang belum didukung dengan dokumen perencanaan yang cukup berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Yaitu :

- a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor;
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi;
- c. Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi;
- d. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi;
- f. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi;
- g. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi;
- h. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi;
- i. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi;

Hasil revidi telah disampaikan oleh tim revidi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. dan disetujui untuk dilakukan perbaikan (CHR terlampir).

6. Saran

Berdasarkan hasil revidi atas Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun Anggaran 2024, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah menyarankan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah memperhatikan:

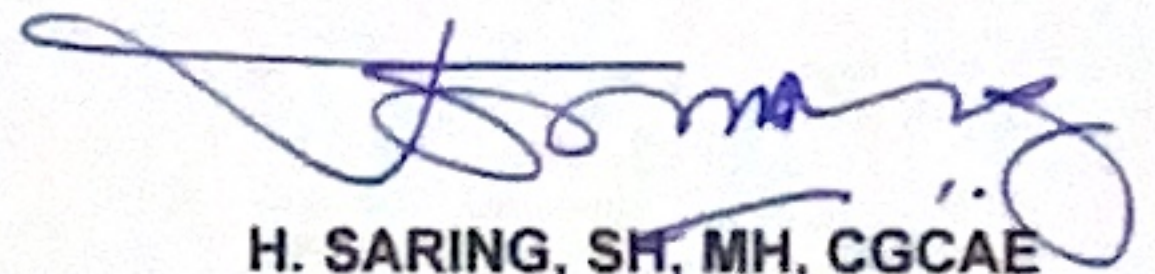
- a. Memperbaiki angka koefisien pada rincian perhitungan belanja RKAP-SKPD secara rasional berupa bilangan bulat, bukan bilangan desimal berdasarkan karakteristik barang dan satuannya.
- b. Saat penyusunan RKA-P perpedoman pada Indikator Kinerja, Tolok Ukur dan Sasaran Kinerja.
- c. Pada penyusunan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada RKA-P Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah didukung dengan dokumen perencanaan yang cukup berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference*.

- d. Mematuhi penerapan kaidah-kaidah penganggaran dalam penyusunan RKA dan ketentuan lainnya yang berlaku.

G. APRESIASI

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu RKAP-PD Tahun Anggaran 2024.

INSPEKTUR DAERAH,



H. SARING, SH, MH, CGCAE
Jaksa Utama Muda
NIP.19650510 198703 1 003

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

INSPEKTORAT

Jalan Yos Sudarso Nomor 06, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Telepon/Faksimile (0536) 3222359

Laman <https://inspektorat.kalteng.go.id>, Pos-el inspektorat@kalteng.go.id

CATATAN HASIL REVIU

ATAS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Tugas dari Gubernur Kalimantan Tengah 700/31/SPT/IRBAN-II/INSP tanggal 26 Agustus 2024 untuk melakukan Reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut :

1. Data Umum

Sesuai Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:900/028.2/TAPD/2024, dan Nomor 180/104/DPRD/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024, bahwa pagu indikatif pada Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-P SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah r Rp18.155.368.248,00 dengan jumlah program/kegiatan/sub kegiatan :

- 10 (sepuluh) program
- 24 (dua puluh lima) kegiatan
- 51 (enam puluh tiga) sub kegiatan

dengan rincian sebagai berikut:

Kode					Uraian	Pagu Sesudah perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Bertambah/Berkurang
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18.155.368.248,00	17.849.570.982,00	305.797.266,00

Kode					Uraian	Pagu Sesudah perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Bertambah/Berkurang
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.307.303.639,00	16.851.506.373,00	455.797.266,00
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.711.529.709,00	13.187.996.782,00	523.532.927,00
2	08	01	1.01		Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	412.738.912,00	378.412.500,00	34.326.412,00
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.573.877,00	32.573.877,00	-
2	08	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	31.046.968,00	31.046.968,00	-
2	08	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.516.476,00	31.516.476,00	-
2	08	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	317.601.591,00	283.275.179,00	34.326.412,00
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.291.134.135,00	8.144.034.135,00	147.100.000,00
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.216.976.833,00	8.069.876.833,00	147.100.000,00
2	08	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-
2	08	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	64.157.302,00	64.157.302,00	-
2	08	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.231.906,00	31.231.906,00	5.000.000,00
2	08	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36.231.906,00	31.231.906,00	5.000.000,00
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161.171.746,00	70.873.906,00	90.297.840,00
2	08	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	161.171.746,00	70.873.906,00	90.297.840,00
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.531.464.410,00	2.145.329.323,00	386.135.087,00
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.937.132,00	23.937.132,00	-
2	08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	925.854.257,00	900.574.400,00	25.279.857,00
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.008.485,00	58.008.485,00	-

Kode					Uraian	Pagu Sesudah perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Bertambah/Berkurang
2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.600.000,00	1.600.000,00	-
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.133.129,00	60.133.129,00	30.000.000,00
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.271.797.307,00	920.942.077,00	350.855.230,00
2	08	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	160.134.100,00	180.134.100,00	- 20.000.000,00
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	284.182.506,00	284.182.506,00	-
2	08	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	54.855.456,00	54.855.456,00	-
2	08	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	229.327.050,00	229.327.050,00	-
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.503.640.830,00	1.702.967.242,00	- 199.326.412,00
2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.703.452,00	13.703.452,00	-
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	304.577.648,00	319.577.648,00	- 15.000.000,00
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.185.359.730,00	1.369.686.142,00	- 184.326.412,00
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490.965.264,00	430.965.264,00	60.000.000,00
2	08	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.004.900,00	108.004.900,00	30.000.000,00
2	08	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.645.953,00	57.645.953,00	10.000.000,00
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	285.314.411,00	265.314.411,00	20.000.000,00
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	989.855.574,00	989.855.574,00	-
2	08	02	1.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	199.043.476,00	199.043.476,00	-

Kode					Uraian	Pagu Sesudah perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Bertambah/Berkurang
2	08	02	1.01	05	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	74.278.437,00	74.278.437,00	-
2	08	02	1.01	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	71.986.600,00	71.986.600,00	-
2	08	02	1.01	07	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	52.778.439,00	52.778.439,00	-
2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	753.786.298,00	888.786.298,00	- 135.000.000,00
2	08	02	1.02	03	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	546.071.310,00	781.071.310,00	- 235.000.000,00
2	08	02	1.02	04	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	207.714.988,00	107.714.988,00	100.000.000,00
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	37.025.800,00	37.025.800,00	-
2	08	02	1.03	05	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	37.025.800,00	37.025.800,00	-
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	526.052.238,00	552.052.238,00	- 26.000.000,00
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	172.690.311,00	172.690.311,00	-
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	50.362.102,00	50.362.102,00	-

Kode					Uraian	Pagu Sesudah perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Bertambah/Berkurang
2	08	03	1.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	122.328.209,00	122.328.209,00	-
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	230.059.781,00	230.059.781,00	-
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	137.098.679,00	137.098.679,00	-
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	92.961.102,00	92.961.102,00	-
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	123.302.146,00	149.302.146,00	26.000.000,00
2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	102.317.146,00	102.317.146,00	-
2	08	03	1.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	20.985.000,00	46.985.000,00	26.000.000,00
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	249.544.817,00	258.520.478,00	8.975.661,00
2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	73.796.000,00	73.796.000,00	-
2	08	04	1.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	73.796.000,00	73.796.000,00	-
2	08	04	1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah	175.748.817,00	184.724.478,00	8.975.661,00

Kode					Uraian	Pagu Sesudah perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Bertambah/Berkurang
					Kabupaten/Kota			
2	08	04	1.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	175.748.817,00	184.724.478,00	- 8.975.661,00
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	205.030.460,00	217.530.460,00	- 12.500.000,00
2	08	05	1.01		Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	205.030.460,00	217.530.460,00	- 12.500.000,00
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	54.173.010,00	66.673.010,00	- 12.500.000,00
2	08	05	1.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	150.857.450,00	150.857.450,00	-
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	637.058.913,00	637.068.913,00	- 10.000,00
2	08	06	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	282.855.606,00	282.865.606,00	- 10.000,00
2	08	06	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	24.409.706,00	74.409.706,00	- 50.000.000,00
2	08	06	1.01	03	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	258.445.900,00	208.455.900,00	49.990.000,00
2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	354.203.307,00	354.203.307,00	-
2	08	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	104.203.307,00	104.203.307,00	-

Kode					Uraian	Pagu Sesudah perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Bertambah/Berkurang
2	08	06	1.02	05	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	250.000.000,00	-
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	988.231.328,00	1.008.481.328,00	- 20.250.000,00
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	494.735.634,00	514.985.634,00	- 20.250.000,00
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	96.126.741,00	96.126.741,00	-
2	08	07	1.01	04	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA kewenangan Provinsi	398.608.893,00	418.858.893,00	- 20.250.000,00
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	493.495.694,00	493.495.694,00	-
2	08	07	1.02	05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	121.578.742,00	121.578.742,00	-
2	08	07	1.02	06	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	371.916.952,00	371.916.952,00	-
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	848.065.209,00	998.065.209,00	- 150.000.000,00
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	151.984.773,00	151.984.773,00	-
2	14	02	01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	151.984.773,00	151.984.773,00	-

Kode					Uraian	Pagu Sesudah perubahan	Pagu Sebelum Perubahan	Bertambah/Berkurang
2	14	02	01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	151.984.773,00	151.984.773,00	-
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	36.339.945,00	64.222.990,00	- 27.883.045,00
2	14	03	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	36.339.945,00	36.339.945,00	-
2	14	03	1.02	04	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga kencana	36.339.945,00	36.339.945,00	-
2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	27.883.045,00	- 27.883.045,00
2	14	03	1.01	13	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	27.883.045,00	- 27.883.045,00
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	659.740.491,00	781.857.446,00	- 122.116.955,00
2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	659.740.491,00	781.857.446,00	- 122.116.955,00
2	14	04	1.01	17	Pelaksanaan Fasilitasi. Pembimbingan. Pengembangan. dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	659.740.491,00	781.857.446,00	- 122.116.955,00
JUMLAH						18.155.368.248,00	17.849.570.982,00	305.797.266,00

2. Uraian Catatan Hasil Reviu

a. Kesesuaian Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P), Rencana Kerja (RENJA) Perubahan dan KUPA-PPAS Perubahan

Berdasarkan hasil reviu, diketahui bahwa kesesuaian rumusan rencana program dan kegiatan dalam RENJA dan KUPA-PPAS Perubahan pada dasarnya sudah terakomodir dalam RKAP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan 10 (sepuluh) Program, 24 (dua puluh empat) Kegiatan, dan 51 (lima puluh tiga) Sub Kegiatan.

Uraian	RKA-P	KUPA PPAS P	Renja- P	Keterangan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	√	√	√	Sesuai
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	√	√	√	Sesuai
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	Sesuai
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	√	Sesuai
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	√	√	√	Sesuai
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√	√	Sesuai
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√	Sesuai
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	√	√	√	Sesuai
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√	Sesuai
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	√	√	√	Sesuai
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	√	√	√	Sesuai
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	√	√	√	Sesuai
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	√	√	√	Sesuai
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√	√	√	Sesuai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	√	√	√	Sesuai
Administrasi Umum Perangkat Daerah	√	√	√	Sesuai
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	√	Sesuai
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√	√	√	Sesuai
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	√	Sesuai

Uraian	RKA-P	KUPA PPAS P	Renja- P	Keterangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	√	√	√	Sesuai
Fasilitas Kunjungan Tamu	√	√	√	Sesuai
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	√	Sesuai
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	√	√	√	Sesuai
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	√	Sesuai
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	√	√	√	Sesuai
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	√	√	√	Sesuai
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	√	Sesuai
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	√	√	√	Sesuai
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	√	Sesuai
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	√	Sesuai
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	√	Sesuai
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	√	Sesuai
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	√	Sesuai
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	√	√	√	Sesuai
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	√	√	√	Sesuai
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai

Uraian	RKA-P	KUPA PPAS P	Renja- P	Keterangan
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	√	√	√	Sesuai
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√	Sesuai
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√	Sesuai
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√	Sesuai
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	√	√	√	Sesuai
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√	Sesuai
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√	Sesuai
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	√	√	√	Sesuai
Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	√	√	√	Sesuai
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	√	√	√	Sesuai
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	√	√	√	Sesuai
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	√	√	√	Sesuai

Uraian	RKA-P	KUPA PPAS P	Renja- P	Keterangan
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√	Sesuai
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	√	√	√	Sesuai
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	√	√	√	Sesuai
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupate layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	√	√	√	Sesuai
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindugnan khusus kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	√	√	√	Sesuai
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	√	√	√	Sesuai
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	√	√	√	Sesuai
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	√	√	√	Sesuai
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	√	√	√	Sesuai
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	√	√	√	Sesuai
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	√	√	√	Sesuai
Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangsa kencana	√	√	√	Sesuai
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	√	√	√	Sesuai

Uraian	RKA-P	KUPA PPAS P	Renja- P	Keterangan
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	√	√	√	Sesuai
Pelaksanaan Fasilitas. Pembimbingan. Pengembangan. dan Penguatan Penyediaan Pengasuhan 1000 HPK	√	√	√	Sesuai

- b. Kesesuaian pencantuman pagu indikatif rencana program dan kegiatan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P SKPD), Rencana Kerja Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan.

Kode					Uraian	RKA-P	Renja -P	KUPA-PPAS P	Keterangan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18.155.368.248,00	18.155.368.248,00	18.155.368.248,00	Sesuai
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.307.303.639,00	17.307.303.039,00	17.307.303.039,00	Sesuai
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.711.529.709,00	13.711.529.709,00	13.711.529.709,00	Sesuai
2	08	01	1.01		Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	412.738.912,00	412.738.912,00	412.738.912,00	Sesuai
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.573.877,00	32.573.877,00	32.573.877,00	Sesuai
2	08	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	31.046.968,00	31.046.968,00	31.046.968,00	Sesuai
2	08	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.516.476,00	31.516.476,00	31.516.476,00	Sesuai
2	08	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	317.601.591,00	317.601.591,00	317.601.591,00	Sesuai

Kode					Uraian	RKA-P	Renja -P	KUPA-PPAS P	Keterangan
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.291.134.135,00	8.291.134.135,00	8.291.134.135,00	Sesuai
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.216.976.833,00	8.216.976.833,00	8.216.976.833,00	Sesuai
2	08	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Sesuai
2	08	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	64.157.302,00	64.157.302,00	64.157.302,00	Sesuai
2	08	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.231.906,00	36.231.906,00	36.231.906,00	Sesuai
2	08	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36.231.906,00	36.231.906,00	36.231.906,00	Sesuai
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	161.171.746,00	161.171.746,00	161.171.746,00	Sesuai
2	08	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	161.171.746,00	161.171.746,00	161.171.746,00	Sesuai
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.531.464.410,00	2.531.464.410,00	2.531.464.410,00	Sesuai
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.937.132,00	23.937.132,00	23.937.132,00	Sesuai
2	08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	925.854.257,00	925.854.257,00	925.854.257,00	Sesuai
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.008.485,00	58.008.485,00	58.008.485,00	Sesuai
2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Sesuai
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.133.129,00	90.133.129,00	90.133.129,00	Sesuai
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.271.797.307,00	1.271.797.307,00	1.271.797.307,00	Sesuai

Kode					Uraian	RKA-P	Renja -P	KUPA-PPAS P	Keterangan
2	08	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	160.134.100,00	160.134.100,00	160.134.100,00	Sesuai
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	284.182.506,00	284.182.506,00	284.182.506,00	Sesuai
2	08	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	54.855.456,00	54.855.456,00	54.855.456,00	Sesuai
2	08	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	229.327.050,00	229.327.050,00	229.327.050,00	Sesuai
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.503.640.830,00	1.503.640.830,00	1.503.640.830,00	Sesuai
2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.703.452,00	13.703.452,00	13.703.452,00	Sesuai
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	304.577.648,00	304.577.648,00	304.577.648,00	Sesuai
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.185.359.730,00	1.185.359.730,00	1.185.359.730,00	Sesuai
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490.965.264,00	490.965.264,00	490.965.264,00	Sesuai
2	08	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.004.900,00	138.004.900,00	138.004.900,00	Sesuai
2	08	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.645.953,00	67.645.953,00	67.645.953,00	Sesuai
2	08	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	285.314.411,00	285.314.411,00	285.314.411,00	Sesuai

Kode					Uraian	RKA-P	Renja -P	KUPA-PPAS P	Keterangan
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	989.855.574,00	989.855.574,00	989.855.574,00	Sesuai
2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	199.043.476,00	199.043.476,00	199.043.476,00	Sesuai
2	08	02	1.01	05	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	74.278.437,00	74.278.437,00	74.278.437,00	Sesuai
2	08	02	1.01	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	71.986.600,00	71.986.600,00	71.986.600,00	Sesuai
2	08	02	1.01	07	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	52.778.439,00	52.778.439,00	52.778.439,00	Sesuai
2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	753.786.298,00	753.786.298,00	753.786.298,00	Sesuai
2	08	02	1.02	03	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	546.071.310,00	546.071.310,00	546.071.310,00	Sesuai
2	08	02	1.02	04	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	207.714.988,00	207.714.988,00	207.714.988,00	Sesuai

Kode					Uraian	RKA-P	Renja -P	KUPA-PPAS P	Keterangan
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	37.025.800,00	37.025.800,00	37.025.800,00	Sesuai
2	08	02	1.03	05	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	37.025.800,00	37.025.800,00	37.025.800,00	Sesuai
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	526.052.238,00	526.052.238,00	526.052.238,00	Sesuai
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	172.690.311,00	172.690.311,00	172.690.311,00	Sesuai
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	50.362.102,00	50.362.102,00	50.362.102,00	Sesuai
2	08	03	1.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	122.328.209,00	122.328.209,00	122.328.209,00	Sesuai
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	230.059.781,00	230.059.781,00	230.059.781,00	Sesuai

Kode					Uraian	RKA-P	Renja -P	KUPA-PPAS P	Keterangan
					Kabupaten/Kota				
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	137.098.679,00	137.098.679,00	137.098.679,00	Sesuai
2	08	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	92.961.102,00	92.961.102,00	92.961.102,00	Sesuai
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	123.302.146,00	123.302.146,00	123.302.146,00	Sesuai
2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	102.317.146,00	102.317.146,00	102.317.146,00	Sesuai
2	08	03	1.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	20.985.000,00	20.985.000,00	20.985.000,00	Sesuai
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	249.544.817,00	249.544.817,00	249.544.817,00	Sesuai
2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	73.796.000,00	73.796.000,00	73.796.000,00	Sesuai

Kode					Uraian	RKA-P	Renja -P	KUPA-PPAS P	Keterangan
2	08	04	1.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	73.796.000,00	73.796.000,00	73.796.000,00	Sesuai
2	08	04	1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	175.748.817,00	175.748.817,00	175.748.817,00	Sesuai
2	08	04	1.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	175.748.817,00	175.748.817,00	175.748.817,00	Sesuai
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	205.030.460,00	205.030.460,00	205.030.460,00	Sesuai
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	205.030.460,00	205.030.460,00	205.030.460,00	Sesuai
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	54.173.010,00	54.173.010,00	54.173.010,00	Sesuai
2	08	05	1.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	150.857.450,00	150.857.450,00	150.857.450,00	Sesuai
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	637.058.913,00	637.058.913,00	637.058.913,00	Sesuai

Kode					Uraian	RKA-P	Renja -P	KUPA-PPAS P	Keterangan
2	08	06	1.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	282.855.606,00	282.855.606,00	282.855.606,00	Sesuai
2	08	06	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	24.409.706,00	24.409.706,00	24.409.706,00	Sesuai
2	08	06	1.01	03	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah. Non Pemerintah. Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	258.445.900,00	258.445.900,00	258.445.900,00	Sesuai
2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	354.203.307,00	354.203.307,00	354.203.307,00	Sesuai
2	08	06	1.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	104.203.307,00	104.203.307,00	104.203.307,00	Sesuai
2	08	06	1.02	05	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Sesuai
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	988.231.328,00	988.231.328,00	988.231.328,00	Sesuai
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan	494.735.634,00	494.735.634,00	494.735.634,00	Sesuai

Kode					Uraian	RKA-P	Renja -P	KUPA-PPAS P	Keterangan
					Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	96.126.741,00	96.126.741,00	96.126.741,00	Sesuai
2	08	07	1.01	04	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupate layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA kewenangan Provinsi	398.608.893,00	398.608.893,00	398.608.893,00	Sesuai
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	493.495.694,00	493.495.694,00	493.495.694,00	Sesuai
2	08	07	1.02	05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindugnan khusus kewenangan Provinsi	121.578.742,00	121.578.742,00	121.578.742,00	Sesuai
2	08	07	1.02	06	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	371.916.952,00	371.916.952,00	371.916.952,00	Sesuai
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	848.065.209,00	848.065.209,00	848.065.209,00	Sesuai
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	151.984.773,00	151.984.773,00	151.984.773,00	Sesuai

Kode					Uraian	RKA-P	Renja -P	KUPA-PPAS P	Keterangan
2	14	02	01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	151.984.773,00	151.984.773,00	151.984.773,00	Sesuai
2	14	02	01	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	151.984.773,00	151.984.773,00	151.984.773,00	Sesuai
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	36.339.945,00	36.339.945,00	36.339.945,00	Sesuai
2	14	03	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	36.339.945,00	36.339.945,00	36.339.945,00	Sesuai
2	14	03	1.02	04	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga kencana	36.339.945,00	36.339.945,00	36.339.945,00	Sesuai
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	659.740.491,00	659.740.491,00	659.740.491,00	Sesuai
2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	659.740.491,00	659.740.491,00	659.740.491,00	Sesuai

Kode					Uraian	RKA-P	Renja -P	KUPA-PPAS P	Keterangan
2	14	04	1.01	17	Pelaksanaan Fasilitas. Pembimbingan. Pengembangan. dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	659.740.491,00	659.740.491,00	659.740.491,00	Sesuai

- c. Kesesuaian Penerapan Standar Satuan Harga dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P SKPD).

Sebagaimana diketahui bahwa penyusunan anggaran belanja kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang terintegrasi dengan Standar Satuan Harga dan Biaya Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan yang berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024. Secara keseluruhan satuan harga dan biaya kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah sesuai ketentuan.

Akan tetapi masih terdapat rencana belanja dengan koefisien tidak rasional, yaitu:

KODE					URAIAN	KOEFISIEN	SATUAN	HARGA (Rp)	JUMLAH (Rp)
2	8	01	1.01		PERENCANAAN. PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				
2	8	01	1.01	07	EVALUASI KIBERJA PERANGKAT DAERAH				
5.1.02.01.01.0026					BELANJA BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK				
					BAHAN CETAK SPESIFIKASI : FOTOVOPY HVS	70.637,478038	LEMBAR	325	22.957.180,36
2	8	01	1.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH				
2	8	01	1.03	02	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD				
5.1.02.01.01.0026					BELANJA BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK				
					BAHAN CETAK SPESIFIKASI : FOTOVOPY HVS	36.718,246138	LEMBAR	325	11.933.429,99
2	8	01	1.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				
2	8	01	1.05	09	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS FUGSI				

5.1.02.02.12.0003					BELANJA BIMBINGAN TEKNIS				
					BEBAN BIMBINGAN TEKNIS	4 ORANG/KALI X 0,846156	ORANG/KALI	6.500.000,00	22.000.056,00
					SPEKIFIKASI: DANA KONTRIBUTSI DIKLAT/BIMTEK 4-6 HARI				
2	8	01	1.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
2	8	01	1.06	08	FASILITAS KUNJUNGAN TAMU				
5.1.02.01.01.0053					BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU				
					BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU	750,3144654 KOTAK	ORANG/KALI	15.900,00	11.930.000,00
					SPEKIFIKASI: SATUAN BIAYA KONSUMSI				

d. Kepatuhan terhadap Kaidah-Kaidah Penganggaran.

Penyusunan penganggaran pada masing-masing sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sudah mendefinisikan tolok ukur dan target kinerja pada indikator capaian program dan hasil/*outcome*.

Kegiatan dalam RKA-P Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 telah cukup memenuhi kaidah-kaidah dalam penganggaran. Akan tetapi masih terdapat Sub Kegiatan yang memiliki Keluaran (*Output*) berbeda antara dokumen RKAP, KUA-PPAS dan Renja yaitu sebagai berikut :

Uraian	Uraian Output	RKA-P		KUPA – PPAS P		Renja P		Keterangan
		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Sesuai
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Sesuai
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	Sesuai

Uraian	Uraian Output	RKA-P		KUPA – PPAS P		Renja P		Keterangan
		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	Sesuai
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Sesuai
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang/Bulan	55	Orang/Bulan	55	Orang/Bulan	Sesuai
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	Sesuai
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Sesuai
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								Sesuai
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	Sesuai
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								Sesuai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	Orang	12	Orang	12	Orang	Sesuai
Administrasi Umum Perangkat Daerah								Sesuai
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	Sesuai
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	Sesuai
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	Sesuai
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	Sesuai
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	Sesuai
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	Sesuai
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	Sesuai

Uraian	Uraian Output	RKA-P		KUPA – PPAS P		Renja P		Keterangan
		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Sesuai
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	1	Unit	Sesuai
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	1	Unit	Sesuai
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Sesuai
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	Sesuai
Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	Sesuai
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	Sesuai
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Sesuai
Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	12	Unit	12	Unit	Sesuai
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	12	Unit	12	Unit	Sesuai
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	Sesuai
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								Sesuai
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi								Sesuai
Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	25	Kebijakan	25	Kebijakan	25	Kebijakan	Sesuai
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	9	Laporan	9	Laporan	9	Laporan	Sesuai
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Sesuai

Uraian	Uraian Output	RKA-P		KUPA – PPAS P		Renja P		Keterangan
		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi								Sesuai
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	5	Orang	5	Orang	5	Orang	Sesuai
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonom	3	Lembaga	3	Lembaga	3	Lembaga	Sesuai
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi								Sesuai
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/ Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	30	Orang	30	Orang	30	Orang	Sesuai
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								Sesuai
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								Sesuai
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	9	Dokumen	9	Dokumen	9	Dokumen	Sesuai
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	9	Perangkat Daerah	9	Perangkat Daerah	9	Perangkat Daerah	Sesuai
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah								Sesuai

Uraian	Uraian Output	RKA-P		KUPA – PPAS P		Renja P		Keterangan
		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
Kabupaten/Kota								
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	50	Orang	50	Orang	50	Orang	Sesuai
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	80	Layanan	85	Layanan	85	Layanan	Tidak Sesuai
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi								Sesuai
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	25	Orang	25	Orang	25	Orang	Sesuai
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	100	Orang	100	Orang	100	Orang	Sesuai
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA								Sesuai
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi								Sesuai
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Sesuai
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota								Sesuai
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	Layanan	1	Layanan	1	Layanan	Sesuai

Uraian	Uraian Output	RKA-P		KUPA – PPAS P		Renja P		Keterangan
		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								Sesuai
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi								Sesuai
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Sesuai
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Sesuai
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								Sesuai
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi								Sesuai
Koordinasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provins	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Sesuai
Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	25	Perangkat Daerah	25	Perangkat Daerah	25	Perangkat Daerah	Sesuai
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi								Sesuai
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provins	30	Orang	14	Orang	30	orang	Tidak Sesuai
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1	Kegiatan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	Sesuai
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								Sesuai
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota								Sesuai

Uraian	Uraian Output	RKA-P		KUPA – PPAS P		Renja P		Keterangan
		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Sesuai
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Kewenangan Provinsi	14	kegiatan	14	kegiatan	14	Kegiatan	Sesuai
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi								Sesuai
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	30	Orang	30	Orang	30	Orang	Sesuai
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	30	Orang	30	Orang	30	Orang	Sesuai
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								Sesuai
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								Sesuai
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk								Sesuai
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Sesuai
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								Sesuai
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB								Sesuai
Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangsa kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	30	Organisasi	30	Organisasi	30	Organisasi	Sesuai
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)								Sesuai

Uraian	Uraian Output	RKA-P		KUPA – PPAS P		Renja P		Keterangan
		Volume	Satuan	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								Sesuai
Pelaksanaan Fasilitas. Pembimbingan. Pengembangan. dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	Sesuai

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 97 Ayat (1), Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2) huruf c berpedoman pada :

a. **Indikator Kinerja;**

b. **Tolok Ukur dan Sasaran Kinerja** sesuai analisis standar belanja;

c. Standar harga satuan;

d. Rencana kebutuhan BMD; dan

e. Standar Pelayanan Minimal.

e. Kelengkapan Dokumen Pendukung.

Penyusunan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKA Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah masih terdapat 9 Sub Kegiatan yang belum didukung dengan dokumen perencanaan yang cukup berupa Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference* (KAK/TOR), yaitu :

- 1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor;
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi;
- 3) Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Provinsi;
- 4) Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi;
- 6) Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi;
- 7) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi;
- 8) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi;
- 9) Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi.

3. Tanggapan

Tanggapan atas catatan hasil reviu (Berisi hal-hal yang belum dikoreksi/diperbaiki atau yang tidak disetujui)

Dinas P3APKB Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya akan memperbaiki kekeliruan serta mematuhi kesesuaian Kelengkapan Dokumen KAK, penerapan Standar Satuan Harga dalam Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran koefisien pada rincian perhitungan belanja RKA-P SKPD secara rasional berupa bilangan bulat serta kaidah dalam konsistensi dalam menginput Keluaran (*Output*) antara dokumen RKAP, KUA-PPAS dan Renja.

4. Saran

Berdasarkan hasil reviu tersebut di atas, kami menyarankan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, agar:

- Memperbaiki angka koefisien pada rincian perhitungan belanja RKA-P SKPD secara rasional berupa bilangan bulat, bukan bilangan desimal berdasarkan karakteristik barang dan satuannya.
- Saat penyusunan RKA-P perpedoman pada Indikator Kinerja, Tolok Ukur dan Sasaran Kinerja.
- Pada penyusunan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada RKA-P Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah didukung dengan dokumen perencanaan yang cukup berupa Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference* (KAK/TOR).
- Mematuhi penerapan kaidah-kaidah penganggaran dalam penyusunan RKA dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Demikian Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

Palangka Raya, 21 Oktober 2024

TIM REVIU RKA-SKPD:

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah,



dr. LINAE VICTORIA ADEN., M.M.Kes
NIP. 19830717 199003 2 006

1. DIANA, S.H., CGCAE
NIP. 19820629 200604 2 006
(Pembantu Penanggung Jawab)
2. HENDRA, S.STP., M.AP
NIP. 19780412 199612 1 002
(Pengendali Teknis)
3. BETSIANY, S.Hut
NIP. 19810512 201001 2 003
(Ketua Tim)
4. HERYANTO S.H. SIREGAR, S.E.
NIP. 19830925 201001 1 022
(Anggota Tim)
5. HARRY SETIAWAN, S.H., CFA
NIP. 19850402 201503 1 001
(Anggota Tim)